

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



KOTA MATARAM TAHUN 2017





PEMERINTAH KOTA MATARAM

I N S P E K T O R A T

Jalan dr. R. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Telp. (0370) 645092

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Mataram untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Reviu LKIP Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai Pedoman Reviu LKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Reviu adalah penyajian manajemen Pemerintah Daerah Kota Mataram.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja yang ada pada LKIP Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini bahwa LKIP Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 telah menyajikan informasi yang handal, akurat dan absah.

Demikian pernyataan reviu LKIP ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 29 Maret 2018

Inspektur

Ir. H. MAKFUL MA'SHUM, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 195812231981031013



WALIKOTA MATARAM

SAMBUTAN



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, laporan kinerja dapat bermanfaat untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ujung tombak penyelenggaraan akuntabilitas kinerja terletak pada terbangunnya pemenuhan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dinamika permasalahan pembangunan kota yang makin beragam, mengharuskan Pemerintah Kota Mataram untuk terus menguatkan komitmen dan berupaya membangun sinergitas dengan berbagai pihak guna menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Tahun 2017 adalah periode strategis pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021. Pengukuran capaian Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 dengan menetapkan tujuan melalui indikator kunci keberhasilan yang lebih terukur menjadi pembahasan baru dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja program pembangunan di tahun ini. Selain itu, peta anggaran dalam rangka mewujudkan tiap-tiap sasaran strategis yang ditetapkan telah menjadi bagian dalam pelaporan tahun ini.

Harapan kita bersama, nantinya Kota Mataram dapat tumbuh dengan geliat pembangunan yang makin positif dalam kerangka mewujudkan visi Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Target pencapaian kinerja program prioritas dapat dicapai dengan baik, sehingga dengan kerjasama dan ikhtiar kita bersama adalah salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya.



Akhir kata, semoga dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017 ini dapat menjadi bahan evaluasi kita bersama untuk terus membangun Kota Mataram yang kita cintai, guna meningkatkan kinerja pembangunan pada tahun mendatang.

Mataram, Maret 2018


Pt. WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM.....	3
D. BIDANG KEWENANGAN.....	5
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
F. PRESTASI DAERAH YANG DIRAIH DARI TAHUN 2016-2017.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. PENETAPAN SASARAN STRATEGIS.....	10
B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017.....	18
A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2017.....	20
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	28
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017.....	69
BAB IV PENUTUP.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi adalah penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan secara bertahap sebagaimana tuntutan masyarakat. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan public sebagaimana dimaksud Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Optimalisasi penerapan prinsip pemerintahan yang baik melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus digalakan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mendorong Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan *Good Governance*.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Pemerintah Kota Mataram wajib melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Mataram atas perencanaan pembangunan yang telah disusun.

Sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi pusat aktivitas perekonomian dan pertumbuhan di sektor jasa. Hal ini sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Untuk mendukung Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional, pemerintah Kota Mataram berupaya mengatasi isu-isu strategis pembangunan yang dihadapi yaitu: Budaya, Kondusifitas Wilayah, Kesehatan, Pendidikan, Daya Saing Perekonomian Daerah, Kemiskinan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup,

Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Sebagai bentuk perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Mataram dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Kota Mataram sebagai Daerah Otonom, maka unsur pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi RPJMD setidaknya harus memuat empat komponen penting yang menjadi satu kesatuan, sebagai berikut:

- a. **Perencanaan Strategis**, yang dimuat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja SKPD dan Penetapan Kinerja (PK).
- b. **Pengukuran Kinerja**, sebagai salah satu metode atau cara mengetahui tingkat kesesuaian antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja oleh SKPD.
- c. **Pelaporan Kinerja**, yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyajikan data dan informasi tentang hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja.
- d. **Evaluasi dan Pemanfaatan Informasi Kinerja**, yang menggambarkan tindak lanjut/perbaikan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dalam mencapai tujuan RPJMD Kota Mataram.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja dalam kerangka sinergitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bermanfaat untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, untuk menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat pengendali, alat penilai, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Sebagai dokumen evaluasi, Laporan Kinerja memiliki dua fungsi, yaitu sebagai evaluasi yang bersifat vertikal (kepada Pemerintahan yang lebih tinggi), serta sebagai evaluasi yang bersifat horizontal (kepada masyarakat di Daerah).

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

lingkungan Pemerintah Kota Mataram, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada:

- a. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021, yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2016; dan
- b. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
- c. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
- d. Perubahan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/VIII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017, memperhatikan ketentuan dan materi pokok yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
19. Peraturan Walikota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2017;
20. Peraturan Walikota Mataram Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017;
21. Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/VIII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021.

D. BIDANG KEWENANGAN

Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; Unsur penunjang Urusan Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada tahun 2017, sebagai berikut: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (1) Tenaga Kerja, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (3) Pangan, (4) Pertanahan, (5) Lingkungan Hidup, (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (9) Perhubungan, (10) Komunikasi dan Informatika, (11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah, (12) Penanaman Modal, (13) Kepemudaan dan Olahraga, (14) statistik, (15) persandian, (16) kebudayaan, (17) Perpustakaan, dan (18) Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2017, antara lain: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Pariwisata, (3) Pertanian, (4) Perdagangan, (5) Perindustrian, (6) Transmigrasi.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dua Puluh Empat Dinas Daerah, terdiri dari: Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi

- Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian; Dinas Perikanan; Dinas Kerasipan dan Perpustakaan.
5. Empat Badan Daerah, terdiri dari: Badan Perencanaan Pembangunan; Badan Penelitian dan Pengembangan; Badan Keuangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 6. Enam Kecamatan, terdiri dari: Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara, dan Kecamatan Sandubaya.
 7. Limapuluh Kelurahan.
 8. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram

F. PRESTASI DAERAH YANG DIRAIH DARI TAHUN 2016-2017

Penghargaan Nasional kepada Pemerintah Kota Mataram, sebagai berikut:

1. Sertifikat ISO 9001-2008 Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diserahkan oleh Mendagri tanggal 16 Maret 2016 di Mataram.
2. Penghargaan dalam Penerapan KTP-Elektronik sehingga dapat mencapai target Penerbitan KTP-Elektronik sesuai jumlah yang ditetapkan diserahkan oleh Mendagri tanggal 16 Maret 2016 di Mataram.
3. IPHI Award 2016 Bidang Kepedulian Lingkungan Hidup diserahkan di Jakarta tanggal 1 Mei 2016.
4. Penghargaan atas diraihnya opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda Tahun Anggaran 2015 oleh BPK tanggal 31 Mei 2016 di Mataram.
5. Piagam Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dari Badan Informasi Geospasial Indonesia RI tanggal 21 Juli 2016 di Tanjung Kab. Lombok Utara.
6. National Procurement Award 2016 pada Kategori Komitmen 100% e-Procurement Pemenuhan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Rakernas LPSE 2016 di Jakarta tanggal 3 November 2016.
7. Peringkat I Nasional Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 oleh Kementrian PUPR di Jakarta tanggal 8 Desember 2016.

8. Kota Mataram sebagai Kota Peduli HAM Tahun 2015 diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada 5 Desember 2016.
9. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dari Menteri Keuangan diserahkan di Mataram tanggal 29 Desember 2016.
10. Peringkat 1 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemkab/ Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 diserahkan di Mataram tanggal 26 Desember 2016.
11. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 Kategori Kota Sedang sebagai daerah yang sukses memelihara dan menata lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dari Kementerian Perhubungan RI Tahun 2016, diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Jakarta tanggal. 31 Januari 2017.
12. Penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2017 Kategori A (sangat baik) kepada DPMPTSP, RSUD dan Disdukcapil Kota Mataram, diserahkan di Jakarta 2 Maret 2017 oleh Menteri PAN-RB RI Asman Abnur.
13. Sertifikat Penghargaan dari SiTRRRD (*Strengthened Indonesian Resilience: Reducing Risk form Disasters*/Penguatan Ketangguhan Indonesia melalui Pengurangan Resiko Bencana) atas peran aktif dalam mengimplementasikan Program SiTRRRD Tahap I (2014-2017) dalam kegiatan penanggulangan resiko bencana di Kota Mataram Tanggal 27 Maret Tahun 2017
14. Piagam dari Gubernur NTB sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Acara Musrenbang Provinsi Tahun 2017.
15. Juara I Stand Gelar Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi NTB ke-XV pada 25 April 2017 di Lombok Barat.
16. Penghargaan IPHI Awards Terbaik Tingkt Nasional 2017 Bidang Pemberdayaan Umat diserahkan oleh IPHI Pusat di Surabaya, 14 Mei 2017
17. Penghargaan atas diraihnya opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda Tahun Anggaran 2016 oleh BPK tanggal 31 Mei 2017 di Mataram.
18. Penghargaan Inspirator Pembangunan Daerah dari Pusat Kajian Keuangan Negara yang diberikan kepada Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, diserahkan di Jakarta tanggal 15 Juni 2017.
19. Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diberikan kepada Wakil Walikota Mataram, diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM R.I A.A. Puspayoga di Makassar Sulsel 11 Juli 2017.

20. Penghargaan Kota Layak Anak Tahun 2017 Kategori Pratama, diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana S. Yembise di Pekanbaru Riau tanggal 22 Juli 2017.
21. Penghargaan Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 yang diberikan kepada Walikota Mataram, diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana S. Yembise di Pekanbaru Riau tanggal 22 Juli 2017.
22. Penghargaan Pengembangan Forum Anak Daerah Terbaik Tahun 2017 yang diberikan kepada Walikota Mataram, diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana S. Yembise di Pekanbaru Riau tanggal 22 Juli 2017.
23. Piala Adipura Kategori Kota Sedang Tahun 2017 diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar di Jakarta pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 tanggal 2 Agustus 2017.
24. Penghargaan Lencana Bintang Pancawarsa II Tahun 2017 kepada Wakil Walikota Mataram diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin di Mataram pada Peringatan Hari Pramuka ke-56 Tingkat Provinsi NTB tanggal. 14 Agustus 2017.
25. Penghargaan sebagai Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Regional IV Tahun 2017 untuk Kelurahan Banjar Kota Mataram, diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta tanggal 15 Agustus 2017.
26. Penghargaan sebagai Juara II dalam Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Nasional Tahun 2017 Wilayah I yang diserahkan oleh Menteri PAN & RB RI Asman Abnur di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2017.
27. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha untuk Walikota Mataram atas keberhasilan Pembinaan Terhadap Juara Terbaik Kelurahan Tk. Nasional (Kelurahan Banjar) tanggal 2 Oktober 2017 pada Acara Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel II) & BBRGM XIII Tk. Nasional Tahun 2017.
28. Sertifikat ISO 9001-2008 kepada DPMPSTP Kota Mataram untuk Layanan Perizinan Terpadu Pemerintah Daerah Satu Pintu (The Local Government's Board for Investment dan One Door Integrated Permit Services) November 2017.
29. Penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2017 untuk Kota Mataram Sebagai Kota Terbaik Kategori Layanan Publik dari Frontier Consulting Group tanggal 8 November 2017.

30. Penghargaan kepada Kota Mataram dari Ombudsman RI dengan Predikat Kepatuhan Tertinggi Terhadap Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Atas 57 Produk Layanan, diserahkan di Jakarta oleh Ketua Ombudsman RI tanggal. 5 Desember 2017
31. Walikota Entrepreneur Award 2017 presented to H. Ahyar Abduh (Kota Mataram) For The Distinguished Accomplishment in HEALTH SERVICES. Diterima di Jakarta 6 Desember 2017 dari PhilipKotlerCenter for ASEAN Marketing
32. Kota Peduli HAM Tahun 2016 diterima oleh Wakil Walikota Mataram pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 di Solo pada 10 Desember 2017
33. Peringkat III Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemkab/ Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 diserahkan di Mataram tanggal 27 Desember 2017 oleh Wakil Gubernur H.Muh Amin SH M.Si.
34. Penghargaan kepada DPMPTSP Kota Mataram sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik", Berdasarkan Hasil Evaluasi Terhadap 72 Kabupaten-Kota Role Model Sesuai dengan KepMenPAN Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementrian/Lembaga, dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Sebagai Lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Diserahkan di Jakarta tanggal 24 Januari 2018 oleh Menteri PANRB.
35. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 dengan Predikat Nilai "B" (Baik) diserahkan di oleh Kementrian PAN dan RB di Jakarta pada Januari 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran kinerja juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang menyangkut keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram.

Sasaran strategis berdasarkan Keputusan Walikota Mataram tentang penetapan IKU Kota Mataram 2016-2021 hasil reviu telah ditetapkan sejumlah 5 tujuan dan 11 Sasaran Strategis, sebagai dasar pengukuran kinerja pada Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017. Kerangka logis dalam penyusunan indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.

Misi 1 bertujuan: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal dengan indikator indeks keamanan manusia. Rasa Aman secara kerangka pikir dapat tercipta dari masyarakat yang menerapkan nilai-nilai agama serta norma-norma budaya dan kearifan lokal, sehingga digunakan untuk mengukur benefit dari pencapaian masyarakat yang menerapkan nilai agama dan kearifan lokal dalam bermasyarakat. Indeks Keamanan Manusia sendiri menggambarkan usaha pemerintah kota mataram dalam rangka menciptakan kondisi aman bagi masyarakat Kota Mataram dengan melihat 4 (empat) dimensi yaitu mengukur usaha pemerintah dalam menjamin keamanan dari bencana; Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan sebagai upaya mempererat kerukunan dan ketentraman di masyarakat; serta Keamanan dari Kekerasan baik dari ancaman kejahatan maupun penindasan golongan masyarakat atas dan mayoritas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu dengan mewujudkan situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif serta

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat akan kondisi tanggap darurat terhadap kejadian bencana.

1. Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif

Terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 yaitu: (1) Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate), dan (2) Indeks Kota Toleran. Penurunan angka kejahatan merupakan indikator yang dapat menggambarkan kondisi masyarakat yang lebih baik serta dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sedangkan indeks toleransi digunakan dengan persepsi bahwa dengan meningkatnya rasa toleransi maka dapat meningkatkan kerukunan serta menciptakan ketentraman di masyarakat Kota Mataram.

2. Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat

Sasaran kedua dalam pencapaian tujuan dari Misi 1 di Tahun 2017 dicapai melalui indikator persentase kejadian bencana tertangani. Dalam komponen penilaian Indeks Keamanan Masyarakat, salah satu yang dinilai adalah dimensi kewanibawaan dari bencana.

Misi 2 : Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing

Misi 2 memiliki tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan.

Dalam rangka mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Mataram terhadap akses Pendidikan dan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Mataram terhadap akses kesehatan yang keduanya ditingkatkan levelnya menjadi layanan yang berkualitas tanpa membedakan siapa yang dilayani.

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Dalam rangka memenuhi sasaran tersebut maka ditetapkan indikator sasaran untuk mengukur pencapaiannya yaitu dengan melihat kinerja dari Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah serta Rata-rata Lama Sekolah. Angka Melek

Huruf menunjukkan kemampuan individu diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Dengan kemampuan membaca dan menulis, individu tersebut memiliki modal dasar dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam rangka pengembangan dirinya. Indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan aksesibilitas penduduk usia sekolah untuk mendapatkan layanan dasar Pendidikan.

2. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas

Peningkatan status kesehatan dan gizi dalam suatu masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia dalam aspek lainnya, seperti pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Kebutuhan masyarakat akan kesehatan harus dapat terakses oleh seluruh masyarakat Kota Mataram sebagai perwujudan dalam menyediakan layanan dasar pemerintahan. Tercapainya kualitas kesehatan dan gizi yang baik tidak hanya penting untuk generasi sekarang tetapi juga bagi generasi berikutnya. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat.

Angka Harapan Hidup digunakan sebagai indikator dalam rangka menunjukan outcome dari pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat Kota Mataram. Angka Harapan Hidup yang meningkat menunjukan keberhasilan kinerja bidang kesehatan di Kota Mataram baik dari peningkatan akses masyarakat maupun perbaikan pelayanan kesehatannya.

3. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Gender serta Perlindungan Anak

Masyarakat yang berdaya menunjukan masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Inisiatif tersebut merupakan modal dalam mewujudkan daerah yang berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Kepemudaan dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Kepemudaan menunjukan kesempatan serta prestasi yang dapat ditunjang oleh perhatian pemerintah dalam mengembangkan sumber daya pemuda. Pemuda merupakan sumberdaya manusia yang

potensial dalam pembangunan daerah. Bentuk perhatian kepada pemuda merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan manusia di masa yang akan datang. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menunjukkan keterlibatan perempuan dalam berbagai peran yang tidak boleh dibatasi hanya karena dia adalah perempuan. Perempuan harus dipandang sebagai modal manusia yang sederajat dengan pria dalam pembangunan, sehingga perempuan selayaknya dapat berkompetisi secara sama dengan pria dalam berbagai bidang.

4. Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan oleh penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan; penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan; penurunan Persentase Keluarga Pra Sejahtera. Sedangkan keberhasilan dan strategi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ditunjukkan dengan ketersediaan pangan yang merupakan komponen hidup dasar bagi masyarakat. Ketersediaan pangan di wilayah Kota Mataram dapat tetap terjaga dengan mempertahankan Indeks Komposit Ketahanan Pangan yang telah berada pada posisi aman dengan angka 3.

Misi 3: Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Misi 3 memiliki tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi penampakan sumberdaya lokal dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Dengan ditetapkannya tujuan tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diharapkan dapat mencapai sasaran strategis pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menciptakan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif. Karena pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan utama dalam menekan pengangguran, menekan angka kemiskinan, dan menekan ketimpangan yang ada.

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun dengan tingkat inflasi yang terjaga serta ketimpangan antar wilayah yang rendah. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin kondisi ekonomi daerah yang sehat. Pertumbuhan ekonomi harus disumbang oleh keberlanjutan lapangan usaha yang menjadi penyumbang

pertumbuhan tersebut serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

2. Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif

Perluasan lapangan kerja merupakan sasaran strategis yang penting untuk diperhatikan. Perluasan kerja dapat memberikan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan. Keberhasilan meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja ditunjukkan dengan capaian target indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK); Tingkat Pengangguran Terbuka serta Rasio Ketergantungan Penduduk.

Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja di Kota Mataram, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Adapun Rasio Ketergantungan Penduduk dapat menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun ke atas digolongkan dalam usia beban ketergantungan. Dengan melihat rasio ketergantungan, kita dapat melihat gambaran cakupan penduduk yang bekerja apakah sudah mencukupi dengan proporsi dari penduduk yang tidak termasuk dalam usia produktif.

Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

1. Tersedianya sarana dan prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai

Peningkatan sarana prasarana perkotaan di Kota Mataram diarahkan dalam rangka mencapai sasaran penyediaan sarana prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai dengan ditunjukkan melalui pencapaian indikator indeks kota layak huni, Nilai Pelaksanaan Rencana Pola Ruang serta Nilai Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang. Penyediaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan publik diarahkan yang memiliki manfaat besar bagi

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, beberapa sarana prasarana diarahkan untuk mendukung upaya penurunan angka kemiskinan melalui penyediaan sarana prasarana dasar yang layak.

Misi 5: Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Misi 5 memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja yaitu indeks reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dipemerintahan ditujukan sebagai langkah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dua sasaran strategis ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan layanan publik serta mewujudkan pengembangan potensi pendapatan daerah guna peningkatan layanan publik.

1. Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik

Dalam upaya mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas pemerintahan dan layanan publik ditetapkan indikator kinerja yang dapat mengawal upaya pencapaian tersebut yaitu melalui pencapaian indikator pencapaian target AKIP dimana outcome dari pencapaian tersebut bertujuan untuk mengarahkan anggaran berbasis kinerja. Indikator lain juga diperlukan antara lain opini BPK yang dapat menunjukkan akuntabilitas pertanggungjawaban atas laporan keuangan. Pencapaian target nilai unit pelayanan publik dalam rangka mengukur mengukur peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara nasional difokuskan pada 3 (tiga) OPD yaitu pelayanan administrasi penduduk, pelayanan perijinan terpadu satu atap, serta pelayanan RSUD. Peluang untuk inovasi daerah juga dibuka dalam ruangannya dengan menargetkan masuknya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota mataram kedalam nominasi inovasi daerah diberbagai penilaian. Sedangkan kinerja lainnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dengan capaiannya pada indeks reformasi birokrasi yang diturunkan dari indikator tujuan dan tidak tercover dalam indikator sasaran lainnya.

2. Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah

Kemandirian daerah merupakan prestasi yang harus dikejar oleh Pemerintah Kota Mataram dimana pada kondisi eksisting penganggaran berbagai program

dan kegiatan sangat bergantung kepada Dana Pusat. Upaya peningkatan potensi pendapatan daerah harus dipacu kinerjanya dengan ditunjukkan dengan indikator kinerja yang dapat terukur dan tercapai secara logis. Peningkatan target persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan pendapatan daerah merupakan indikator yang dianggap penting dalam memacu kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam menggali potensi dan menutup kebocoran dalam tata kelola pemungutan pajak asli daerah.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta indikator keberhasilannya secara ringkas disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Misi 1 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai			
Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	Indeks Kemanan Manusia	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan, yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)
			Indeks Kota Toleran
		Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	Persentase kejadian bencana tertangani
Misi 2 : Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing			
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Angka Melek Huruf
			Harapan Lama Sekolah
			Rata-rata Lama Sekolah
		Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup
		Terwujudnya pemberdayaan	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
	Angka Kemiskinan	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
			Persentase Keluarga Pra Sejahtera
			Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)
Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB
			Laju Inflasi
			Indeks Gini
		Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
			Tingkat Pengangguran Terbuka
			Rasio Ketergantungan Penduduk
Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan			
Meningkatnya infrastruktur publik, serta penunjang ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni	Tersedianya sarana dan prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Indeks Kota Layak Huni
			Nilai Pelaksanaan Rencana Pola Ruang
			Nilai Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang
Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai AKIP
			Opini BPK
			Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
			Nominasi Inovasi Daerah
		Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan

B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Seluruh tujuan dan sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2017 diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja utama Kota Mataram Tahun 2017, sebagai berikut:

TABEL 2.2
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA MATARAM TAHUN 2017

No	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	Indeks Kemanan Manusia	3
2	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	250
3		Indeks Kota Toleran	85
4	Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	Persentase kejadian bencana tertangani	100%
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,31
6		Angka Kemiskinan	9,06
7	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Angka Melek Huruf	92,74
8		Harapan Lama Sekolah	15,82
9		Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	9,09
10	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	71,00
11	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	63
12		Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	93

No	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
13	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,60
14		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,42
15		persentase keluarga prasejahtera	10,41
16		Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3
17	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya lokal	Pertumbuhan Ekonomi	8,11%
18	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif	Pertumbuhan PDRB	8,11%
19		Laju Inflasi	3-5
20		Indeks Gini	0,35
21	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	Tingkat Kesempatan Kerja	94
22		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5
23		Rasio Ketergantungan Penduduk	43
24	Meningkatnya infrastruktur publik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni	62
25	Tersedianya sarana dan prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	Nilai Pelaksanaan Rencana Pola Ruang	2,01
26		Nilai Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang	2,01
27		Indeks Kota Layak Huni	62
29	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
30	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	Nilai AKIP	60,10
31		Opini BPK	WTP
32		Penilaian Unit Pelayanan Publik Kemenpan	1/3
34		Nominasi Inovasi Daerah	1
35		Indeks Reformasi Birokrasi	CC
36	Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	20,60%

Sumber: Keputusan Walikota Mataram tentang penetapan IKU Kota Mataram 2016-2021 hasil reviu

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2017

Pendekatan dalam perwujudan *good governance* yaitu akuntabilitas dimana dapat menunjukkan sejauhmana instansi pemerintah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Evaluasi program/kegiatan harus dapat memberikan gambaran hingga pencapaian kinerja dari setiap output yang direncanakan untuk pencapaian sasaran strategis yang ingin dicapai. Landasan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

1. Indikator bermakna target peningkatan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna target penurunan, artinya: jika semakin besar realisasi dibandingkan target berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, didasarkan pada skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja berdasarkan

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Formulir E.15 serta digunakan indikator warna sesuai kriteria sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Indikator Warna
1	≥ 91	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Hasil dari capaian berdasarkan sasaran strategis di Kota Mataram yang telah ditetapkan, merupakan kinerja yang disasar oleh program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021. Upaya mewujudkan komitmen pembangunan dengan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau warga Kota Mataram, dilakukan dengan memastikan bahwa setiap Visi & Misi RPJMD dapat dijalankan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pencapaiannya.

Capaian dalam RPJMD diukur melalui indikator-indikator yang diuji melalui teknik *cascade down* dari tingkat Walikota hingga kepada eselon III sehingga penekanan pada program pembangunan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan mengatasi setiap permasalahan yang direncanakan. Pada level Perangkat Daerah, penajaman atas capaian indikator kinerja utama program di turunkan kembali menjadi kebutuhan output dari kegiatan sebagai jawaban bagi kebutuhan dalam pencapaian indikator kinerja program yang direncanakan.

Keseluruhan target dan realisasi indikator kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017 baik indikator tujuan maupun sasaran strategis sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi Pembangunan Kota Mataram disajikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	
A	Indeks Keamanan Manusia	NA	3	3,18	106%	
	1	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (<i>crime rate</i>)	256,47	250	252,08	99,17%
	2	Indeks Kota Toleran	87	85	85	100%
	3	Persentase kejadian bencana	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
B	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,20	78,31	77,94	99,53%
1	Angka Melek Huruf	92,74	92,74	91,71	98,89%
2	Harapan Lama Sekolah	15,5	15,82	15,68	99,12%
3	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	9,25	9,09	9,41	103,52%
4	Angka Harapan Hidup	70,70	71,00	70,94	99,92%
5	Indeks Pembangunan Kepemudaan	60	63	61	96,83%
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	92,35	93	92,4	99,35
C	Angka Kemiskinan	9,8%	9,06%	9,55%	94,59
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,69	1,60	1,73	91,88%
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,42	0,47	88,10
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	11,41	10,41	10,05	103,46
4	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	3	3	3	100%
D	Pertumbuhan Ekonomi	8,06	8,11	8,11	100%
1	Pertumbuhan PDRB	8,06	8,11	8,11	100%
2	Laju Inflasi	2,47	3-5	3,59	100%
3	Indeks Gini	0,35	0,35	0,39	88,57%
4	Tingkat Kesempatan Kerja	93,83	94	94,65	100,69%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,17	5,5	5,35	102,73%
6	Rasio Ketergantungan Penduduk	43,58	43	43,35	99,19%
E	Indeks Layak Huni	NA	62	61,6	99,35%
1	Indeks Layak Huni	NA	62	61,6	99,35%
2	Nilai Pelaksanaan Rencana Pola Ruang	NA	2,01	1,70	84,58%
3	Nilai Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang	NA	2,01	1,40	69,65%
F	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	100%
1	Nilai AKIP	58,88	60,10	63,13	105,04%
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%
3	Penilaian Unit Pelayanan Publik Kemenpan	NA	1/3	1/3	100%
4	Nominasi Inovasi Daerah	NA	1	1	100%
5	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	100%
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan	20,66%	20,60%	27,17%	131,89%

Pengukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Dari **5 tujuan dan 11 sasaran strategis** dengan indikator kinerja sebanyak **34 indikator kinerja**, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram berdasarkan kriteria penilaian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

NO	KATEGORI CAPAIAN TUJUAN & SASARAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Tinggi	30 Indikator
2	Tinggi	3 Indikator
3	Sedang	1 Indikator
4	Rendah	0 Indikator
5	Sangat Rendah	0 Indikator
Jumlah		34 Indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan rata-rata capaian kinerja per indikatornya dirinci dalam bentuk matrik, sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
MISI 1: <i>Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai</i>							
1	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan yang kondusif	2	-	-	-	-	99,58
	1) Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)						99,17
	2) Indeks Kota Toleran						100
2	Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	1	100	-	-	-	100

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
	1) Persentase kejadian bencana tertangani						100
MISI 2: <i>Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing</i>							
2	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	3	-	-	-	-	100,51
	1) Angka Melek Huruf						98,89
	2) Harapan Lama Sekolah						99,12
	3) Rata-rata Lama Sekolah						103,52
3	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	1	-	-	-	-	99,92
	1) Angka Harapan Hidup						99,92
4	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	2	-	-	-	-	98,02
	1) Indeks Pembangunan Kepemudaan						96,83
	2) Indeks Pemberdayaan Gender						99,35
5	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat	4	-	-	-	-	95,86
	1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)						91,88
	2) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					88,10	
	3) Persentase Keluarga Prasejahtera						103,46
	4) Indeks Komposit Ketahanan Pangan						100
MISI 3 : <i>Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera</i>							

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
1	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif	3	-	-	-	-	93,33
	1) Pertumbuhan PDRB						100
	2) Laju Inflasi						100
	3) Indeks Gini					80,00	
2	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	3	-	-	-	-	100,87
	1) Tingkat Kesempatan Kerja						100,69
	2) Tingkat Pengangguran Terbuka						102,73
	3) Rasio Ketergantungan Penduduk						99,19
MISI 4 : <i>Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan</i>							
1	Tersedianya sarana dan prasarana publik, serta penunjang perekonomian dan sosial yang memadai	3	-	-	-	-	91,97
	1) Indeks Kota Layak Huni						99,35
	2) Nilai Pelaksanaan Rencana Pola Ruang					84,58	
	3) Nilai Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang				69,65		
MISI 5 : <i>Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)</i>							
1	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	5	-	-	-	-	101
	1) Indeks Reformasi Birokrasi						100
	2) Nilai AKIP						105,04

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
	3) Opini BPK						100
	4) Penilaian Unit Pelayanan Publik						100
	5) Nominasi Inovasi Daerah						100
2	Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	1	-	-	-	-	131,89
	1) Persentase PAD terhadap Pendapatan						131,89
Rata-Rata Seluruh Capaian Sasaran Strategis			98,33	Sangat Tinggi			

Berdasarkan capaian kinerja 28 indikator sasaran strategis, 27 indikator berada pada hasil kinerja sangat tinggi dan tinggi. Gradasi tersebut menunjukkan capaian realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja yang diharapkan. Sedangkan terdapat 1 indikator kinerja hasil sedang yang berada pada gradasi cukup. Hal tersebut menunjukkan capaian realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis Kota Mataram Tahun 2017 sudah berada pada rata-rata pencapaian yang sangat tinggi sesuai dengan yang diharapkan yaitu sebesar 98,33 persen.

Pencapaian sasaran strategis yang direncanakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai Misi Kota Mataram yang telah diperjanjikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram untuk Tahun 2017. Dalam rangka menguji apakah Misi tersebut berhasil dicapai oleh kinerja dari sasaran strategis, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan tujuan dari tiap-tiap misi. Indikator tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengukuran kinerja dari Misi Kota Mataram tiap tahunnya.

Adapun rincian kelima misi yang secara terukur difokuskan pada lima tujuan dengan jumlah indikator tujuan pada masing-masing misi sebagai berikut:

MISI	JUMLAH TUJUAN DAN INDIKATOR	JUMLAH INDIKATOR SASARAN
Misi 1	1 tujuan dengan 1 indikator kinerja	3
Misi 2	1 tujuan dengan 2 indikator kinerja	10
Misi 3	1 tujuan dengan 1 indikator kinerja	6
Misi 4	1 tujuan dengan 1 indikator kinerja	3
Misi 5	1 tujuan dengan 1 indikator kinerja	6

MISI	JUMLAH TUJUAN DAN INDIKATOR	JUMLAH INDIKATOR SASARAN
<i>Jumlah</i>	6 indikator tujuan	28

Sedangkan pencapaian kinerja masing-masing tujuan disajikan dalam format yang serupa dengan pencapaian sasaran strategis, sebagai berikut:

No	INDIKATOR TUJUAN	Realisasi	≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
MISI 1: <i>Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai</i>							
TUJUAN: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal							
1	Indeks Keamanan Manusia	3,18	-	-	-	-	106,00
Capaian Indikator Tujuan:			100%	Sangat Tinggi			
MISI 2: <i>Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing</i>							
TUJUAN: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat							
1	Indeks Pembangunan Manusia	77,94	-	-	-	-	99,53
2	Angka Kemiskinan	9,55	-	-	-	-	94,59
Capaian Rata-rata Indikator Tujuan:			97,06%	Sangat Tinggi			
MISI 3 : <i>Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera</i>							
TUJUAN: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya lokal							
1	Pertumbuhan Ekonomi	8,11	-	-	-	-	100
Capaian Indikator Tujuan:			100	Sangat Tinggi			
MISI 4 : <i>Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan</i>							

No	INDIKATOR TUJUAN	Realisasi	≤50	51 ≤65	66 ≤75	76 ≤90	≥91
TUJUAN: Meningkatnya infrastruktur publik, ekonomi dan sosial yang berkualitas							
1	Indeks Kota Layak Huni	61,6	-	-	-	-	99,35
Capaian Indikator Tujuan:			99,35	Sangat Tinggi			
MISI 5 : <i>Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)</i>							
TUJUAN: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	-	-	-	-	100
Capaian Rata-rata Indikator Tujuan:			100	Sangat Tinggi			
Rata-Rata Seluruh Capaian Misi (6 Indikator Tujuan)			99,91	Sangat Tinggi			

Dari 6 indikator tujuan diatas capaian kinerja rata-ratanya mencapai **99,91 persen** dengan kriteria ***Sangat Tinggi***.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Misi 1: Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.

Misi 1 bertujuan: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal dengan indikator Indeks Kemanan Manusia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif

Terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 yaitu: (1) Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate), dan (2) Indeks Kota Toleran dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (<i>crime rate</i>)	256,47	250	252,08	99,17
2	Indeks Kota Toleran	87	85	85	100%

Pengendalian angka kriminalitas tidak dapat secara langsung menjadi kendali dari Pemerintah Kota Mataram, namun pengendaliannya lebih kepada proses penciptaan situasi yang aman dengan menjaga ketertiban masyarakat.

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui 4 (empat) program pokok yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anggota SatpolPP Kota Mataram menjadi Aparat SatpolPP yang handal dan tersertifikasi untuk melaksanakan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dalam memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah Kota Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - c. Peningkatan kapasitas kegiatan Korsik Kota Mataram
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, bertujuan agar terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif dengan melaksanakan Patroli Rutin ke seluruh wilayah Kota Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pembangunan pos jaga/ronda
 - b. Pengendalian keamanan lingkungan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan, bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat yang berbasis Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) melalui Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pemantauan situasi Kamtibmas
4. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, bertujuan untuk memberdayakan Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan Peraturan Daerah, dan melaksanakan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah, serta kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus pelanggaran PERDA Kota Mataram
- b. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah
- c. Pelaksanaan yustisi penegakan PERDA, PERWAL dan Keputusan Walikota Mataram
- d. Penyusunan rancangan peraturan Walikota Mataram tentang ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah

Komposisi penduduk Kota Mataram yang majemuk dengan berbagai ras, suku dan agama sangat rawan akan potensi konflik, jika tidak ditangani dengan benar. Dalam mengoptimalkan penanganan konflik beberapa hal yang dilakukan :

- a. Meningkatkan Supremasi hukum secara tegas oleh Aparat Keamanan dan Pemerintah Kota Mataram (dinas/instansi yang terkait);
- b. Memberikan sanksi/hukuman bagi yang melanggar kesepakatan bersama/perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertikai.
- c. Mengintensifkan hubungan silaturahmi antar lingkungan-lingkungan yang berkonflik dengan pertemuan terbuka seperti pengajian umum bersama, sosialisasi tentang pentingnya harmonisasi kehidupan sosial bermasyarakat

Dalam rangka mencapai strategi tersebut maka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dilakukan melalui 3 program pokok yaitu:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan dan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - c. Peningkatan ideology dan ketahanan bangsa
 - d. Penerimaan dan penyerahan kirab pataka
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berbudaya dalam forum pengkajian masalah strategis dan dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mental dan moralitas remaja dan tenaga kerja dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial politik.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anggota SatpolPP Kota Mataram menjadi Aparat SatpolPP yang handal dan tersertifikasi untuk melaksanakan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dalam memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah Kota Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - c. Peningkatan kapasitas kegiatan Korsik Kota Mataram
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, bertujuan agar terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan kondusif dengan melaksanakan Patroli Rutin ke seluruh wilayah Kota Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pembangunan pos jaga/ronda
 - b. Pengendalian keamanan lingkungan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan, bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat yang berbasis Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) melalui Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang dilaksanakan melalui kegiatan: Pemantauan situasi Kamtibmas
7. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, bertujuan untuk memberdayakan Aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan Peraturan Daerah, dan melaksanakan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah, serta kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pemberdayaan PPNS dan penanganan kasus-kasus pelanggaran PERDA Kota Mataram
 - b. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah
 - c. Pelaksanaan yustisi penegakan PERDA, PERWAL dan Keputusan Walikota Mataram
 - d. Penyusunan rancangan peraturan Walikota Mataram tentang ketenteraman dan ketertiban umum
 - e. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah

2. Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 yaitu Persentase kejadian bencana tertangani dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kejadian bencana tertangani	100%	100%	100%	100

Kota Mataram merupakan salah satu Kota/kabupaten di Prov. NTB termasuk dalam zona rawan bencana yang ada di Indonesia, beberapa jenis terjadi di Kota Mataram antara lain: longsor, genangan, banjir, gelombang pasang, tsunami, abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial. Potensi bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia umumnya sehingga Sasaran kedua dalam pencapaian tujuan dari Misi 1 di Tahun 2017 dicapai melalui indikator persentase kejadian bencana tertangani.

Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana baik pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra bencana maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana telah disediakan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai agar tujuan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam komponen penilaian Indeks Keamanan Masyarakat, salah satu yang dinilai adalah dimensi kewanibawaan dari bencana dimana terdapat 2 (dua) komponen penilaian yaitu kesiapsiagaan bencana dengan level "menengah" (skor 2,5) dan risiko bencana dengan level "baik" (skor 3,8). Hal ini menunjukkan perlu peningkatan lebih pada sisi kesiapsiagaan bencana dan antisipasi bencana. Sedangkan penanganan risiko bencana yang tidak dapat dihindari sudah berada pada level baik terhadap penanganan kejadian bencana alam sebanyak 29 kejadian di Tahun 2017 dan 1 korban meninggal dunia. Namun tentu saja masih terdapat beberapa catatan untuk tetap direncanakan peningkatan kinerja penanganan risiko bencana.

Komponen kesiapsiagaan bencana yang diemban oleh BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran masih banyak yang harus diperbaiki, baik kesiapsiagaan dalam

antisipasi bencana maupun kejadian bencana. Beberapa kendala dilapangan menjadi evaluasi bagi metode pelaksanaan sosialisasi dimasyarakat terkait kejadian kebakaran diantaranya nomor telpon Dinas PMK untuk melaporkan kejadian kebakaran ternyata belum banyak masyarakat yang mengingat. Hal lain yaitu keperdulian masyarakat pengguna jalan terhadap prioritas Mobil Pemadam Kebakaran yang akan menangani kebakaran masih kurang. Untuk itu, Dinas Pemadam Kebakaran yang secara khusus menangani kejadian bencana kebakaran sedang menyusun skenario simulasi yang dapat memetakan kondisi riil kesiapsiagaan penanganan kebakaran sehingga dapat dievaluasi kemampuan *respon time*, kesiapan petugas serta keperdulian dan dukungan masyarakat terhadap petugas yang akan menangani kebakaran. Dengan pemetaan masalah yang baik akan menjadi evaluasi bagi metode-metode perbaikan yang efektif terhadap beberapa permasalahan dalam kesiapsiagaan bencana.

Dengan berbagai kondisi diatas ditetapkan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD Kota Mataram;
2. Meningkatkan pemahaman/kesadaran masyarakat terhadap potensi kebencanaan;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat mengantisipasi bencana;
4. Meningkatkan kemampuan aparatatur/relawan dalam penanganan bencana;
5. Meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan BPBD dalam penanganan pra bencana tanggap darurat maupun pasca bencana;
6. Meningkatkan keterpaduan para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.

Pelaksanaan strategi diatas dilakukan dengan menjalankan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial yang bertujuan untuk menormalisasi fungsi hunian penduduk yang terdampak bencana dan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam
 - b. Peningkatan dan rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik penanggulangan bencana dan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

- c. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
 - d. Pencegahan/pengurangan potensi bencana
3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan SDM bagi aparat terhadap pencegahan dan kesiagaan kebakaran dan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
 - b. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
 - c. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Misi 2 : Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing

Misi 2 memiliki tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan.

Dalam rangka mencapai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka Melek Huruf	92,74	92,74	91,71	98,89
2	Harapan Lama Sekolah	15,5	15,82	15,68	99,12
3	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	9,25	9,09	9,41	103,52

Arah kebijakan mutu pendidikan di Kota Mataram pada periode RPJMD Kota Mataram 2016-2021, berada pada tataran peningkatan dalam tiga hal pokok, yaitu: akses pendidikan, tata kelola pendidikan, dan infrastruktur pendidikan, melalui penguatan atau pemantapan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada point akses pendidikan, Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB tidak mengalami kendala dalam akses masyarakat untuk

memperoleh pendidikan dengan kondisi geografis yang memudahkan masyarakat. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kelompok penduduk usia sekolah (7-12 tahun) telah melampaui 100%. Artinya, penduduk usia sekolah secara penduduk tidak ada yang tidak bersekolah. Sebagai ibukota Provinsi NTB, kemajuan sektor pendidikan di Kota Mataram menyebabkan adanya peningkatan minat bagi penduduk usia sekolah dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya untuk melanjutkan pendidikan di Kota Mataram, terutama pada jenjang sekolah tingkat pertama dan sekolah tingkat menengah dengan jumlah sebesar $\pm 7\%$.

Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), analisis kesenjangan kompetensi, serta penyusunan program dan strategi peningkatan kompetensi menuju pada tercapainya SNP. Pemerintah Daerah mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau di atas SNP setidaknya mencapai 25% SD dan 40% SMP. Pengembangan guru sebagai profesi merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi.

Program Pendidikan non formal dan informal di Kota Mataram semakin meningkat, peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan semakin maju. Kesempatan bagi warga masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan formal pun terbuka lebar, peran serta aktif dari lembaga masyarakat untuk membantu warga masyarakat sangat mendukung program penuntasan buta aksara.

Pengembangan potensi Pendidikan Kesenian Tradisional berkembang dengan pesat, telah banyak kejuaraan tingkat daerah maupun nasional yang diikuti oleh siswa siswi Kota Mataram. Dalam pembinaan kehidupan beragama siswa, sejak tahun 2000 seluruh siswa Kota Mataram setiap hari Jum'at berseragam muslim/muslimah bagi siswa yang beragama Islam dan seragam yang pantas/menyesuaikan bagi siswa yang beragama selain Islam. Selain itu juga sebelum memasuki pelajaran guru melakukan pembinaan iman dan taqwa kepada siswa sesuai agama siswa.

Pengembangan bentuk aktualisasi budaya lokal diarahkan melalui peningkatan frekuensi penyelenggaraan event-event berbasis pada aktualisasi budaya lokal melalui pertunjukan, pameran, festival, dan lomba. pengembangan minat

masyarakat dalam seni dan budaya dilaksanakan melalui pergelaran hasil karya seni di tengah masyarakat. Keberagaman etnis, suku dan agama sebagai salah satu karakteristik Kota Mataram yang berpenduduk heterogen, memunculkan adanya penyelenggaraan seni budaya sesuai dengan etnis yang ada. Keberadaan sanggar-sanggar seni memiliki peran dalam mengembangkan potensi seni masyarakat. Jumlah sanggar seni 203 tersebar di seluruh kecamatan. Sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya.

Keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB) saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang.

Capaian sasaran pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif dilaksanakan melalui program pokok sebagai berikut:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan memperoleh pendidikan setidaknya-tidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat. Pendidikan dasar sembilan tahun dapat ditempuh melalui jalur formal pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, maupun nonformal pada Kejar PAKET A dan PAKET B.
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan melalui uji kompetensi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar, Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik.
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan mekanisme evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan melalui Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan, Pengembangan Sistem Informasi melalui WEB, serta

- pelaksanaan Kerjasama dengan Media Massa dan Elektronika tentang Informasi Berbagai Isu Pendidikan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Program Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal bertujuan agar semua anak usia 0-6 tahun memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan tahap perkembangan atau tingkat usia. PAUD merupakan pendidikan persiapan untuk melanjutkan pendidikan di SD/MI. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan (*the quality of intakes*) yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar melalui Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). PAUD dilaksanakan melalui jalur formal di Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
 5. Program Bidang Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar bertujuan meningkatkan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu bagi siswa, melalui kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa, Pengadaan Alat Peraga/Praktek Siswa, Pengadaan Meubelair Sekolah, Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu.
 6. Program Pendidikan Non Formal bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal dan memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan formal secara terbuka, peran serta aktif dari lembaga masyarakat untuk membantu warga masyarakat sangat mendukung program penuntasan buta aksara, dengan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pengembangan data dan informasi.
 7. Program Pendidikan Luar Biasa, bertujuan mengembangkan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup berasaskan imtaq, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar, serta Lomba Tadarus Al-Qur'an Tingkat Pelajar.

Sebagai Pusat dan Referensi Pendidikan di Provinsi NTB, Kota Mataram harus menunjang layanan publiknya dibidang perpustakaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas Pendidikan di Kota Mataram. Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan yang diimplementasikan melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, kinerja perpustakaan dan arsip bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, dan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.

Keberadaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan referensi keilmuan menyediakan koleksi bahan pustaka yang benar-benar relevan dengan permintaan pengguna. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut adanya perubahan pelayanan yang sebelumnya berbasis manual menjadi berbasis digital. Pengembangan *e-library* sebagai tuntutan kepraktisan dan kemudahan akses layanan perpustakaan secara bertahap akan dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Penurunan jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah sebanyak 9.423 disebabkan oleh beralihnya kunjungan ke Perpustakaan Daerah ke TBM dan Perpustakaan Sekolah, meningkatnya kunjungan ke TBM bagi masyarakat dan Perpustakaan Sekolah bagi siswa dalam memperoleh referensi pustaka, disebabkan oleh dekatnya jarak tempuh dan meningkatnya koleksi pustaka yang dimiliki oleh TBM tersebut. Pada aspek yang lain, dalam upaya menunjang pelayanan kebutuhan akan koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana dan tenaga pengelola yang sesuai dengan bidangnya.

Pelayanan yang baik akan memberikan warna baru bagi eksisnya sebuah perpustakaan, dengan jumlah enam tenaga Pustakawan yang diangkat melalui kualifikasi pendidikannya dan *impassing*, secara fungsional jumlah tenaga pengelola ini masih belum sesuai dengan harapan. Dalam upaya meningkatkan SDM para pengelola Perpustakaan, dilakukan dengan mengirim para Pustakawan untuk mengikuti pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan. Sehingga secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan. Disamping memberdayakan fungsi perpustakaan, dilakukan pembinaan perpustakaan pada sekolah-sekolah SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA, Rumah Ibadah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se Kota-Mataram.

Penelitian-penelitian pembangunan daerah semakin berkembang. Disisi lain isu keterbukaan informasi publik semakin dikedepankan dalam rangka

reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Kebutuhan layanan arsip daerah menjadi tulang punggung dalam pengelolaan informasi tersebut yang arahnya kepada akses bagi perkembangan pembangunan daerah yang erat kaitannya pada Pendidikan.

Sebagai langkah awal, Dinas Arsip dan Perpustakaan mengimplementasikan dua program pokok terdiri dari:

1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, bertujuan mengupayakan pelestarian dan penyelamatan dokumen/arsip daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, bertujuan meningkatkan kemampuan operasional sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.

Implementasi program tersebut antara lain pelaksanaan pendampingan kearsipan di Lembaga Pemerintah, Sekolah dan SKPD, adapun hasil (outcome) yang ingin dicapai agar dapat memahami tata cara pengelolaan arsip yang baik sehingga terdapat kesamaan pemahaman dengan pengelola kearsipan. Keberadaan arsip sebagai aset vital dalam Daerah, terutama bagi dokumen-dokumen penting diarahkan pengembangannya melalui penyimpanan arsip yang berbasis pada digital. Perekaman arsip vital secara bertahap dilakukan melakukan pemilahan dan pemindaian sesuai dengan kriteria pengarsipan.

2. Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Angka Harapan Hidup	70,70	71,00	70,94	99,92%

Peningkatan status kesehatan dan gizi dalam suatu masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia dalam aspek lainnya, seperti pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Tercapainya kualitas kesehatan dan gizi yang baik tidak hanya penting untuk generasi sekarang tetapi juga bagi generasi berikutnya. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat

diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB merupakan barometer pembangunan kesehatan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mencermati beberapa indikator kesehatan di Kota Mataram dalam kurun dua tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2017 seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan tren derajat kesehatan masyarakat di Kota Mataram. Positifnya kinerja pembangunan kesehatan di Kota Mataram tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai seperti Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, Puskesmas dan Jaringannya. Selain itu juga, ketersediaan sumber daya kesehatan seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan jenis tenaga kesehatan lainnya merupakan tulang punggung (*backbone*) dalam mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan di Kota Mataram. Dengan demikian, ketersediaan akses yang memadai dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan di Kota Mataram telah memberikan dampak positif bagi optimalnya penanganan masalah kesehatan masyarakat.

Selain dari aspek ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan (*supply of health services*), aspek pemanfaatan fasilitas kesehatan (*demand of health services*) yang disediakan oleh pemerintah Kota Mataram tentu akan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kota Mataram patut berbangga karena tingkat pendidikan warganya sudah di atas rata-rata kabupaten/kota lain di provinsi NTB, hal ini tentu memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat kesadaran masyarakat atas arti pentingnya kesehatan. Hal ini tercermin dari rendangnya Angka kesakitan (morbiditas) penduduk di Kota Mataram pada tahun 2017 yaitu 15,81% dengan rata-rata lama sakit yaitu 5,6 hari. Angka kesakitan pada penduduk berasal dari *community based* data yang diperoleh melalui pengamatan terutama yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan rutin dan insidental. Kasus penyakit yang paling banyak diderita masyarakat di Kota Mataram adalah infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas. Kondisi ini erat kaitannya dengan kesehatan lingkungan masyarakat. Selain itu, hal yang patut diwaspadai agar derajat kesehatan masyarakat tetap terjaga adalah meminimalisir perubahan *life style* kearah negatif seperti kurang aktifitas fisik, lebih sering mengkonsumsi

fast food, junk food dan *stress factor* adalah beberapa faktor yang memicu tingginya angka kejadian hipertensi.

Fenomena perubahan musim di Kota Mataram juga memerlukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir terjadinya kasus seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Sebagian diantaranya mewabah secara tiba-tiba dan menjangkiti ribuan orang dalam waktu singkat. Penyakit DBD sebagai salah satu penyakit menular, sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Kota Mataram karena penyebarannya yang cepat, berpotensi kematian dan semua wilayah sudah pernah terjangkit DBD. *Insidence rate* DBD mengalami penurunan kasus, dimana kasus yang terjadi belum melampaui ambang batas yang ditetapkan secara nasional yaitu <math> < 20 / 100.000 < /math> penduduk. Kebersihan lingkungan dan pola hidup yang kurang baik, kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit DBD yang cenderung mengarah ke upaya kuratif serta kurangnya upaya promotif ataupun preventif masyarakat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tetap tingginya kejadian DBD.

Dalam membangun jejaring yang baik dalam mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan, peran Puskesmas dan jaringannya harus mampu sebagai penopang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, sehingga pemahaman masyarakat harus terbentuk. Setiap penduduk yang menginginkan pelayanan di tingkat RSUD, harus memperoleh rujukan terlebih dahulu dari Puskesmas. RSUD Kota Mataram oleh BPJS Pusat telah ditunjuk sebagai pilot project untuk melakukan verifikasi sendiri terhadap pengajuan klaim peserta BPJS. Dengan kerjasama ini, pihak RSUD menyediakan tenaga verifikator sejumlah 15 orang terdiri dari 2 dokter umum dan tenaga perawat untuk melakukan verifikasi kesesuaian diagnosa penyakit dengan persyaratan klaim BPJS.

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Perawatan Kelas III RSUD, untuk penduduk ber-KTP Kota Mataram, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Mataram, khususnya saat adanya masa tunggu sebelum terbitnya KARTU JKN dari BPJS. Keterlambatan proses klaim dapat diantisipasi dengan tetap terjaminnya pembiayaan yang dapat dilakukan sesuai dengan Perwal dimaksud. Data terakhir jumlah peserta yang dibiayai preminya oleh Pemerintah Kota Mataram sebanyak 29.953 orang hingga Desember 2017. Untuk diketahui bahwa pada tahun 2017, persentase penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan PBI (22,19%), BPJS Kesehatan Non PBI (20,40%), Jamkesda (28,84%), dan Asuransi Swasta (1,295).



Dalam rangka mencapai penurunan angka kemiskinan ditetapkan sasaran strategis dengan capaian kinerja yaitu:

3. Sasaran Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Kepemudaan	60	63	61	96,83
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	92,35	93	92,4	99,35

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Mataram meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 92,35 persen menjadi 92,40 persen. Ini artinya peningkatan pembangunan perempuan di Kota Mataram semakin baik sehingga hampir tidak terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98 (kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Besaran angka ini didominasi oleh penduduk usia lanjut yang berjenis kelamin perempuan. Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan di Kota Mataram tahun 2017 mencapai 90,97%.

Kebijakan yang ditetapkan adalah Kebijakan yang Sadar Gender, dengan mengakui perempuan adalah aktor pembangunan yang sama dengan laki-laki,

keterlibatan perempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi gendernya sehingga keterlibatannya berbeda dan seringkali tidak setara; hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaat dari program sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam menjawab kebutuhan praktis gender mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender, dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam menargetkan proporsi peserta MPBM sebesar 30% adalah peserta dari unsur perempuan. Disamping itu dilakukan fasilitasi bagi pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan dan peningkatan frekuensi kegiatan berbasis pada pemberdayaan perempuan.

Disamping penguatan peran perempuan, upaya perlindungan terhadap anak terus menerus dilakukan dengan pedoman Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan Perwal Kota Mataram Nomor 33 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Mataram serta memberikan akses dan ruang ekspresi serta media kreativitas anak. Keberadaan Taman-taman Kota yang juga menjadi Kawasan Hijau Kota, dijadikan sebagai salah satu ruang apresiasi dan media ekspresi anak. Pembinaan dan fasilitasi pembentukan forum anak kelurahan se kota Mataram sebagai wahana anak meyalurkan kreativitasnya di masing-masing kelurahan se kota Mataram. terhadap Dari sisi kebijakan, Pemerintah telah menjadikan perlindungan anak menjadi urusan wajib di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2013 telah dicanangkan Kota Mataram menuju Kota Layak Anak. Langkah utama dalam Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak adalah menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) yang memuat 24 indikator yang merujuk pada 5 klaster Konvensi Hak Anak untuk mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram menjadikan kepentingan terbaik bagi pemenuhan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai dasar dalam hal perencanaan, penyusunan program, kegiatan dan anggaran.

Adapun dalam rangka pemberdayaan masyarakat juga mendapat perhatian dengan indikator kinerja terhadap pemberdayaan perempuan dan pemuda. Keseluruhan program yang langsung mengarahkan pada pemberdayaan

masyarakat dilaksanakan oleh 6 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Ampenan, Mataram, Cakranegara, Selaparang, Sekarbela dan Sandubaya, serta 50 Kelurahan. Namun program tersebut juga banyak ditunjang oleh program-program di Perangkat Daerah lainnya dimana sasaran dari program Perangkat Daerah tentu saja adalah masyarakat di Kecamatan. Program pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah adalah sangat strategis, fungsi yang harus diemban adalah sebagai mediator, katalisator, fasilitator dan negoisator. Secara spesifik fungsi dasar organisasi Kecamatan adalah koordinator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya serta pelaksana sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota dalam pemberdayaan dan pelayanan umum kepada masyarakat program pokok, sebagai berikut:

1. Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik
 - Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
 - Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
 - Rakor Pokja PUG dan PA
 - Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
 - Forum Anak/Kongres Anak/Hari Anak nasional
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, bertujuan menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

- Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan
 - Monev dan pelaporan
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan
- Pembinaan organisasi perempuan

Dalam hal optimalisasi peranserta kepemudaan dilaksanakan melalui penguatan peran Organisasi kepemudaan di masyarakat maupun di sekolah, antara lain KNPI, FKPPi, Forum Organisasi Siswa Intra Sekolah (FK-OSIS), Paskibraka, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), UKS, Kelompok Sukarela Remaja (KSR), Sahabat Teman Sebaya (STS), Sanggar Olahraga Rekreasi, dan Kelompok Pencinta Alam. Latihan Dasar Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan, Pembinaan Paskibraka, Musabaqah Pelajar Kota Mataram (MTQ, MFQ/MHQ, MSQ dan MKQ), Pelaksanaan Tadarus Al-Qur'an Pelajar dan Guru Pembina Imtaq, Pertukaran Pemuda Antar Daerah, serta Lawatan Sejarah Pelajar. Capaian indikator kinerja utama kepemudaan dan olahraga dilakukan dengan mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi kepemudaan meliputi organisasi kepemudaan sebanyak 71 buah yang terdiri dari 11 organisasi kepemudaan yang berada di sekolah, dan 60 organisasi kepemudaan yang berada di luar sekolah.

Dalam mengoptimalkan organisasi olahraga yang terdiri dari 50 jenis olahraga, yang telah memiliki kepengurusan cabang olahraga di Kota Mataram sebanyak 30 cabang dan 20 cabang kepengurusannya belum terbentuk di Kota Mataram. Kegiatan keolahragaan sebanyak 7 kali secara rutin dilakukan setiap tahun, antara lain Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pendidikan Indonesia (LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi Olahraga Unggulan Daerah (KOUD), dan Pekan Olahraga Antar Satuan Pendidikan. Disamping itu, peningkatan ruang kreasi dan ekspresi masyarakat dalam berolahraga untuk meningkatkan produktivitas dilakukan melalui penyediaan sarana-sarana penunjang olahraga non prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga kreasi di ruang publik yang ada di wilayah Kota Mataram. Penyediaan Taman Udayana, Taman Selagalas, Taman Abiantubuh, Taman-taman Bermain, serta Taman Lansia dalam upaya mengoptimalkan ekspresi masyarakat di bidang olahraga.

untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, yang dilaksanakan melalui tiga program pokok sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program peningkatan peran serta kepemudaan

3. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
4. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
6. Program Pengembangan Nilai Budaya Olahraga

4. Sasaran Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,69	1,60	1,73	91,88
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,42	0,47	88,10
3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	11,41	10,41	10,05	103,46
4	Indeks Komposit Ketahanan Pangan	3	3	3	100

Kota Mataram memiliki target 1% penurunan angka kemiskinan, namun dalam pencapaiannya angka kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2017 sebesar 9,55 persen dari 9,8 di tahun 2016. Secara target yang ditetapkan, Kota Mataram hanya mencapai kinerja penurunan sebesar 25 persen dari yang ditargetkan. Namun dalam indikator sasaran yang ditetapkan dan menjadi acuan dalam pencapaian tujuan sudah menunjukkan target yang baik seperti capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) berkinerja 108,13 persen; Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berkinerja 114,63 persen; Presentase Keluarga Pra Sejahtera berkinerja sebesar 136 persen; Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP) telah mencapai indeks sempurna terhadap ketersediaan pangan sehingga kinerjanya mencapai 100%.

Kinerja dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dilaksanakan melalui berbagai program perlindungan sosial (*social safety net*) maupun program-program pemberdayaan kepada kelompok masyarakat miskin. Patut diapresiasi bahwa angka kemiskinan di Kota Mataram selama kurun waktu 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 s/d. 2017 terus mengalami penurunan dari 9,80% pada tahun 2016 menjadi 9.55 % pada tahun 2017. Laju penurunan angka kemiskinan

pada tahun 2017 mengalami perlambatan sebesar 0,25%, posisi lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,65%. Lambannya penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram terutama disebabkan oleh masih adanya kelompok masyarakat sangat miskin (*extremely poor*) yang sulit dientaskan di Kota Mataram seperti kelompok penyandang disabilitas berat, lanjut usia terlantar dan buta huruf. Oleh Karena itu, diperlukan bantuan secara khusus secara intensif dan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk sangat miskin agar tetap bisa hidup secara layak. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif serta untuk mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram telah dirumuskan empat strategi utama yaitu: (1) Memperbaiki program perlindungan sosial; (2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; (3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (4) Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan telah diupayakan serangkaian kegiatan yang lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin (kluster III) pada tahun 2017 yaitu:

1. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin sebanyak 50 orang;
2. System Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) selama 1 tahun;
3. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 56 orang;
4. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 30 orang;
5. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar sebanyak 104 orang;
6. Penanganan ANJAL selama 1 tahun;
7. Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia sebanyak 50 orang berlokasi di 2 (dua) panti;
8. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan selama 1 tahun;
9. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial (PMKS) sebanyak 45 orang.
10. Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR) dalam penanganan masalah sosial selama 1 tahun;

11. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika sebanyak 15 orang.

Strategi tersebut telah membuahkan hasil yang tercermin dari meningkatnya beberapa capaian indikator dalam dua tahun terakhir yaitu persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti meningkat sebesar 0,78% dari 2,35% pada tahun 2016 menjadi 3,13% pada tahun 2017; Jumlah PMKS yang ditangani meningkat dari 42.074 orang pada tahun 2016 menjadi 42.321 orang tahun 2017 atau meningkat sebesar 0.58%. Selain itu, tren positif juga terjadi pada capaian persentase Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna yang aktif dalam program pemberdayaan dan penanganan PMKS yang naik sebesar 3,13% dari 47,77% pada tahun 2016 menjadi 55,95% pada tahun 2017. Sementara itu, ada beberapa indikator urusan wajib sosial yang capaiannya mengalami stagnasi yaitu Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti; Persentase respon time penanganan korban bencana alam/bencana sosial; Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yang mengalami perubahan; dan Persentase Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri. Sementara dua indikator lainnya yang capaiannya mengalami penurunan yaitu 1). persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya turun dari 17,06% pada tahun 2016 menjadi 12,46% pada tahun 2017; dan 2) Persentase Keluarga Miskin yang meningkat kualitas hidupnya juga turun dari 0,25% pada tahun 2016 menjadi 0,19% pada tahun 2017.

Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan melalui delapan program pokok, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, bertujuan meningkatkan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu 1). Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin; 2). Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT); 3). Pemantapan dan Pendampingan e-Warong KUBe Jasa; 4). Pemantauan Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, bertujuan melaksanakan rehabilitasi sosial ekonomi di masyarakat khususnya PMKS, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu : 1). Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2). Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut

- tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; dan 3). Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
3. Program pembinaan anak terlantar, bertujuan membina perilaku dan meningkatkan kualitas serta keterampilan anak terlantar guna peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui kegiatan yaitu 1). Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar; dan 2). Penanganan Anak Jalanan (ANJAL).
 4. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, bertujuan melaksanakan bimbingan sosial bagi PMKS Lansia yang dilaksanakan melalui Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia.
 5. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, eks PSK/WTS, eks narkoba dan penyakit sosial lainnya), bertujuan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi ODHA, pemulung, eks narkoba, eks wanita tuna susila dan eks narapidana yang dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial dan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.
 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, bertujuan melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial, yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.
 7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan bagi satuan linmas, yang dilaksanakan melalui Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas.
 8. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu 1). Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH); 2). Peningkatan Program keserasian Sosial; 3). Penguatan Nilai Nilai Kepahlawanan; 4). Peningkatan Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS); dan 5) Peningkatan *Corporate Social Responcibility* (CSR).
 9. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika.

Penurunan persentase keluarga pra sejahtera merupakan indikator yang juga berperan dalam mencapai sasaran strategis ini. Kinerja dari indikator tersebut

sangat ditunjang oleh peranan dari Dinas Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berkaitan dengan cakupan layanan KB, pencapaian program dari hasil pelayanan dan pembinaan sampai dengan Desember 2017 jumlah peserta KB aktif mengalami peningkatan, dimana jumlah peserta KB aktif sebesar 55.535 dari PPM sebesar 55.535 peserta atau 100,00% dari PPM dan 76,71% dari PUS sebesar 72.393 peserta. Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2016, jumlah peserta KB aktif sebesar 50.485 peserta dari PPM sebesar 50.882 dan PUS sebesar 68.317 peserta.

Sedangkan pencapaian peserta KB baru bulan Januari sampai dengan Desember 2017 sebesar 9.801 peserta atau 100,36% dari PPM peserta baru sebesar 9.766 peserta. Pencapaian peserta KB baru tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1.859 peserta dimana peserta KB baru tahun 2016 sebesar 11.625 peserta dari PPM peserta KB baru sebesar 10.327 peserta

1. Program Keluarga Berencana, bertujuan memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana & kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka Kematian Ibu, bayi & Anak serta penanggulangan masalah reproduksi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana, Lomba Institusi Masyarakat, Pembinaan Keluarga Berencana (DAK), Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik).
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR yang bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas generasi mendatang yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.
3. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan kegiatan : Sarana Bahan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Sarana Bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (DAK)
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan dengan kegiatan Peran serta kepala lingkungan, RT dan LSOM dalam program PPKB. Orientasi kelompok UPPKS bagi pengurus/kader kelompok UPPKS.
5. Program Advokasi dan Penggerakan dengan kegiatan antara lain Sosialisasi keebijakan pengendalian penduduk dan KB, Pelatihan Pencatatan dan

Pelaporan, Rakornis, Pertemuan Fapsedu Tk. Kota, Pertemuan Koalisi Kependudukan

6. Program Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB/PKB dan kader KB antara lain : Peningkatan kapasitas kader, dan Pertemuan kader.

Ketahanan Pangan dalam perspektif Kota Mataram sangat erat hubungannya dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat karena ketersediaan pangan merupakan komponen dasar bagi kehidupan 9,55 persen masyarakat Kota Mataram yang berkategori miskin. Kelangkaan Pangan dapat meningkatkan harga kebutuhan tersebut sehingga beban mereka akan meningkat dan mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Strategi dalam ketersediaan pangan diupayakan dalam beberapa langkah yaitu mendrive makanan pokok masyarakat serealisa ke arah bahan makanan lain sehingga ketergantungan akan ketersediaan bahan pokok serealisa akan berkurang dan ketersediaanya menjadi tercukupi untuk golongan masyarakat kurang mampu. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram, berkontribusi positif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 4,04 kg/kapita/tahun dari tingkat konsumsi sebesar 31,50 kg/kapita/Tahun tahun 2016 menjadi 35,54 kg/kapita/Tahun tahun 2017.

Selain itu, ditingkatkan pula kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk tanaman strategis yang dapat mengurangi lonjakan harga pada komoditas tersebut yang sering disebabkan karena kekurangan produksi diantaranya adalah komoditas cabe serta sayuran. Capaian kinerja dari strategi tersebut dapat ditunjukkan dari Penghargaan Kreasi Cita Rasa pada Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Pangan Lokal, dalam rangka Hari Pangan Sedunia XXXVII Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 di Pontianak.

Selain strategi diatas, dalam rangka menunjang ketahanan pangan juga harus dapat menjamin bahwa komoditas pangan sebagai komponen dasar masyarakat di Kota Mataram aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pemantauan berkoordinasi dengan BPPOM serta disosialisasikan dan diumumkan bahwa 100 persen komoditas pangan di Kota Mataram Tahun 2017 aman untuk dikonsumsi. Rasa aman terhadap kebutuhan pangan masyarakat dapat menjaga stabilitas harga komoditas pangan serta produksi komoditas tersebut.

Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Misi 3 memiliki tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi penampakan sumberdaya lokal dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan PDRB	8,06	8,11	8,11	100
2	Laju Inflasi	2,47	3-5	3,59	100
3	Indeks Gini	0,35	0,35	0,39	88,57

Pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan tidak dapat dipisahkan dalam memperlihatkan indikasi pembangunan ekonomi suatu daerah, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat menjamin seluruh masyarakat akan tambah sejahtera serta kemiskinan berkurang di suatu daerah. Indikator lain perlu dimunculkan sebagai pembanding dari kualitas pertumbuhan ekonomi agar arah pembangunan yang merata dapat terlihat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditargetkan naik dari tahun 2016 sebesar 8,06 persen menjadi sebesar 8,11 persen. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi untuk tahun 2017. Pertumbuhan PDRB senantiasa mengalami kenaikan, begitupun secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 17.253 juta rupiah. Nilai PDRB Kota Mataram tahun 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 12.478 juta rupiah. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

Laju inflasi di Kota Mataram sesuai dengan target mampu dikendalikan pada kisaran 3-5 persen yaitu sebesar sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah. Dengan inflasi yang terkendali akan mendukung pada minat investasi swasta di Kota Mataram yang akan membawa *multiplayer effect* terhadap perekonomian kota mataram terutama pada kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Pengendalian inflasi juga sangat berpengaruh pada

masyarakat miskin yang sangat sensitif pada perubahan harga terutama untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Kontribusi kelompok usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Mataram ADH Konstan 2010 mengalami kenaikan sebesar 0,01% dari 1,47% tahun 2016 menjadi 1,48% tahun 2017. Perkembangan positif ini sejalan dengan geliat pembangunan di Kota Mataram dengan memperhatikan posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat dan pusat perdagangan dan jasa. Salah satu sub sektor yang sedang menunjukkan peningkatan peranannya dalam perekonomian Kota Mataram adalah Pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan kepariwisataan. Pada tahun 2017, tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 361.824 orang wisatawan dari total jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 sebesar 623.835 orang wisatawan menjadi 985.659 orang wisatawan. Indikator jumlah kunjungan wisatawan melampaui target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 157,99%.

Untuk lebih meningkatkan kembali tingkat kunjungan wisatawan perlu dilakukan beberapa upaya diantaranya intensifikasi promosi pariwisata baik *direct promotion* maupun melalui media-media promosi lainnya, meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam penatan infrastruktur Kota untuk mendukung daya tarik wisata, dan pelaksanaan event-event atau festival budaya dengan melibatkan peserta baik dari tingkat nasional maupun mancanegara.

Adapun dalam rangka melaksanakan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata dilaksanakan melalui 3 program pokok yang terdiri dari:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan pemasaran pariwisata melalui promosi wisata yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
 - c. Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada obyek wisata dan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - b. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

- c. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
 - d. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan antara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah dan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.
 - b. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.

Tingkat inflasi (*inflation rate*) memberi indikasi kondisi suhu perekonomian suatu negara atau daerah. Pada prinsipnya, tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu di bawah 10%. Inflasi ringan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan insentif bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksi. Namun demikian, tingkat inflasi juga harus dijaga agar tetap stabil paling tidak pada kisaran 3% s/d. 4%, karena kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun bagaimana tingkat inflasi juga tidak menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, karena inflasi yang terlalu tinggi bisa menambah beban pengeluaran penduduk berpendapatan rendah sehingga mereka rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Patut diapresiasi kinerja Kota Mataram dalam dua tahun terakhir (Tahun 2015 s.d. 2016) dalam mengendalikan inflasi daerah yang berada pada kisaran 3% yang masih on the track dengan target inflasi Bank Indonesia atau inflation targeting framework (ITF) yaitu 4% dengan deviasi $\pm 1\%$.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesetabilan harga di Kota Mataram dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta perkembangan komoditas strategis di Kota Mataram pada 4 (*empat*) pasar tradisional serta melalui koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi. Salah satu rekomendasi TPID Kota Mataram terkait dengan keberadaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai bentuk nyata upaya pemerintah Kota Mataram dalam memberikan informasi secara luas ke masyarakat mengenai kondisi harga bahan pangan strategis di 4 (*empat*) pasar besar diantaranya pasar kebon roek, pasar pagesangan, pasar mandalika dan pasar cakranegara berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas inflasi di Kota Mataram. Melalui perluasan informasi harga dimaksud meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga bahan

pangan strategis yang terjadi sehingga meminimalisir terjadinya kekhawatiran di masyarakat terkait ketersediaan stok bahan pangan.

Peranan investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram begitu krusial, berkontribusi sebesar 38.69% terhadap PDRB Kota Mataram pada tahun 2017. Hal ini juga bisa dilihat dari terus meningkatnya nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB dari Rp. 5,050 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 6,68 Triliun pada tahun 2017. Laju pertumbuhan investasi juga mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir, yaitu tumbuh sebesar. Banyaknya investor yang menanamkan investasinya di Kota Mataram tidak lepas dari daya tarik Kota Mataram sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, hiburan (*entertainment*) dan perbelanjaan (*shopping centre*). Hal ini juga didukung oleh penetapan Kota Mataram dalam RTRW Nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan konsep MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions), dan pada RTRW Provinsi NTB sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Proses perijinan yang semakin mudah dengan tenggat waktu yang semakin cepat juga menjadi daya tarik investor menanamkan modalnya di Kota Mataram. Rata-rata, proses penyelesaian ijin investasi tepat waktu sudah mencapai lebih dari 98%. Ini artinya bahwa ada kepastian (*certainty*) dalam menjalankan bisnis di Kota Mataram. Selain itu, lama pengurusan berbagai ijin di Kota Mataram lebih singkat.

Perkembangan usaha di Kota Mataram menunjukkan pertumbuhan yang signifikan berdasarkan jumlah SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI yang diterbitkan. Jumlah usaha perdagangan pada tahun 2016 meningkat sebanyak 563 unit usaha dari 1.687 unit usaha tahun 2015 menjadi 2.250 unit usaha tahun 2015.

Terkait dengan intervensi terhadap kelompok pedagang informal atau yang lebih dikenal dengan Pedagang Kali Lima (PKL), Pemerintah Kota Mataram telah melakukan penataan terhadap titik-titik PKL yang ada. Adapun jumlah lokasi titik PKL yang telah diintervensi pada tahun 2017 adalah sejumlah 29 titik meningkat sebanyak 3 titik dari tahun 2016. Penataan titik PKL dimaksud untuk lebih memperindah dan mempercantik wajah Kota Mataram, dimana selama ini permasalahan sektor informal dalam hal ini keberadaan PKL di Kota Mataram cenderung dikonotasikan menimbulkan kekumuhan.

penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan usaha yang dilaksanakan melalui empat program pokok, terdiri dari:

1. Program Pengamanan Perdagangan Menuju Tertib Ukur, bertujuan mewujudkan daerah tertib ukur, dilaksanakan melalui kegiatan

- Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah, Peningkatan Pengawasan Kemetrolgian, Bimbingan dan Penyuluhan Kemetrolgian, dan Sinkronisasi Pengawasan Metrologi Legal.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor melalui promosi perdagangan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan dan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional.
 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, bertujuan Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa serta tertibnya perizinan di bidang perdagangan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, Pengawasan dan Pembinaan Perijinan di Bidang Perdagangan, Monitoring Persediaan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditi Strategis Lainnya, Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (DAK), Pengawasan Peredaran Barang Penting (Barang Yang Diatur).
 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, bertujuan meningkatkan kemampuan mengelola usaha bagi PKL dan sarana pedagang kecil serta tertatanya PKL, dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan serta Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.

Kategori Industri Pengolahan merupakan kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Segala bentuk perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Berdasarkan tabel 4.39, perkembangan PDRB kelompok usaha Industri Pengolahan Atas Dasar Harga (ADH) Konstan 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp. 65,7 milyar lebih dari Rp.1,1 trilyun lebih pada tahun 2015 menjadi Rp.1,17 trilyun lebih tahun 2016. Jika dilihat dari perkembangannya, terjadi perubahan yang mendasar terkait dengan nilai PDRB kategori usaha industri pengolahan dengan terjadinya perubahan tahun dasar yaitu dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010.

Perhitungan nilai PDRB kategori usaha industri pengolahan berdasarkan harga konstan (tahun 2000), tahun 2015 sebesar Rp.347.2 milyar lebih. Kondisi dimaksud sejalan dengan dampak perubahan tahun dasar yaitu terjadinya perubahan secara makro terhadap struktur dan perkembangan perekonomian daerah dari level bawah ke menengah atau ke level yang lebih atas.

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram di tahun 2015 melaksanakan berbagai upaya, antara lain: melakukan pembinaan IKM serta kemampuan teknologi industri, memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku IKM serta bantuan peralatan dan Pengembangan Ekonomi Produktif, Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta.

Pemerintah Kota Mataram secara intensif telah melakukan upaya peningkatan klaster unggulan di sentra-sentra industri. Penanganan secara intensif dimaksudkan dalam rangka percepatan peningkatan daya saing industri dari berbagai aspek secara menyeluruh.

Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan berbagai upaya, antara lain: Meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi; Meningkatkan penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam event-event sebagai sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah; Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas wilayah.

Dari berbagai upaya tersebut, perkembangan jumlah IKM tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah IKM Formal meningkat sejumlah 77 IKM dari 2.172 unit usaha tahun 2016 menjadi 2.249 unit usaha di tahun 2017. Kondisi yang sama terjadi pada perkembangan jumlah IKM Non Formal, dimana meningkat sejumlah 91 unit IKM dari 2.269 unit usaha tahun 2016 menjadi 2.360 unit usaha tahun 2017.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram, berkontribusi positif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 4,04 kg/kapita/tahun dari tingkat konsumsi sebesar 31,50 kg/kapita/Tahun tahun 2016 menjadi 35,54 kg/kapita/Tahun tahun 2017.

Disisi lain, capaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 340,839 ton dari 380,93 pada tahun 2016 menjadi 378,932

pada tahun 2017. Kondisi dimaksud didominasi oleh perubahan faktor cuaca dan lahan yang mulai menyempit.

Sedangkan dari sisi kinerja Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar tidak mengalami kenaikan masih tetap pada angka 1.328,70 ton pada tahun 2016 menjadi 1.328,70 ton pada tahun 2017. Masih tetapnya angka tersebut dikarenakan alih fungsi lahan menjadi perumahan.

2. Sasaran Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Kesempatan Kerja	93,83	94	94,65	100,69
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,17	5,5	5,35	102,73
3	Rasio Ketergantungan Penduduk	43,58	43	43,35	99,19

Sebagaimana dibahas pada sasaran sebelumnya bahwa pertumbuhan investasi dapat membawa *multiplayer effect* pada kesempatan kerja masyarakat sehingga peranan investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram begitu krusial. Dalam peta perekonomian Kota Mataram, peranan investasi berkontribusi sebesar 38.69% terhadap PDRB Kota Mataram pada tahun 2017. Hal ini juga bisa dilihat dari terus meningkatnya nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB dari Rp. 5,050 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 6,68 Triliun pada tahun 2017.

Laju pertumbuhan investasi juga mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Banyaknya investor yang menanamkan investasinya di Kota Mataram tidak lepas dari daya tarik Kota Mataram sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, hiburan (*entertainment*) dan perbelanjaan (*shopping centre*). Hal ini juga didukung oleh penetapan Kota Mataram dalam RTRW Nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan konsep MICE (*Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions*), dan pada RTRW Provinsi NTB sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Proses perijinan yang semakin mudah dengan tenggat waktu yang semakin cepat juga menjadi daya tarik investor menanamkan modalnya di Kota Mataram. Rata-rata, proses penyelesaian ijin investasi tepat

waktu sudah mencapai lebih dari 98%. Ini artinya bahwa ada kepastian (*certainty*) dalam menjalankan bisnis di Kota Mataram. Selain itu, lama pengurusan berbagai ijin di Kota Mataram lebih singkat.

Masalah ketenagakerjaan tidak lepas dari beberapa isu utama seperti tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan pekerja. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakmampuan lapangan pekerjaan yang ada dalam mengatasi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah. Artinya ketika daya serap lapangan pekerjaan rendah, maka dapat menimbulkan masalah pengangguran yang tinggi. Kemudian tingkat pendidikan pekerja yang rendah juga mencerminkan rendahnya kualitas pekerja yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka. Dengan demikian, daya saing penduduk dalam lapangan pekerjaan akan berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan juga akan semakin tinggi. Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kota Mataram akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).

Tingkat Kesempatan kerja di Kota Mataram terus mengalami peningkatan dari 93,83% pada tahun 2016 menjadi 94,65% pada tahun 2017. Tingginya tingkat kesempatan kerja di Kota Mataram lebih disebabkan karena tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yaitu sebesar 8.11% pada tahun 2017, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Mataram dari 6.17% pada tahun 2016 menjadi 5,35% pada tahun 2017. Namun demikian tantangan Kota Mataram di masa mendatang kian berat terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan mengingat jumlah penduduk usia produktif terus bertambah tiap tahun seiring dengan semakin menyusutnya penduduk usia di bawah 15 tahun. Tidak mengherankan, saat ini Kota Mataram lagi menikmati bonus demografi di saat kabupaten/Kota lain di Provinsi NTB masih mengalami beban demografi karena rasio penduduk non produktif terhadap produktif cukup besar yaitu di atas 50%.

pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan lapangan kerja yang dilaksanakan melalui program sebagai berikut:

1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui kegiatan Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan

- hubungan industrial dan kegiatan Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja dan kegiatan Pengembangan Bintek Kewirausahaan, Kelembagaan, Produktivitas Tenaga Kerja
 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui kegiatan Pameran Bursa Kerja (*Job Fair*) dan Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri melalui Wirausaha.

Misi 4: Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

1. Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana publik dan penunjang perekonomian yang memadai

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Layak Huni	NA	62	61,6	99,35%
2	Nilai Pelaksanaan Rencana Pola Ruang	NA	2,01	1,70	84,58%
3	Nilai Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang	NA	2,01	1,40	69,65%

Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan rencana tata ruang pada tahun 2031, khususnya masih sulitnya meningkatkan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan luas 6.130 Ha, Kota Mataram membutuhkan 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik setara dengan luas 1.226 Ha. Saat ini RTH Publik Kota Mataram mencapai 12,50% atau seluas 766,25 Ha.

Selama tahun 2017, salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pemenuhan rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang juga merupakan salah satu jenis RTH. Sejauh ini Pemerintah Kota Mataram telah meningkatkan kualitas penataan pemakaman umum sesuai aspirasi masyarakat. Kegiatan itu berupa penembokan, paving block, pengurukan, penerangan makam, pembangunan atau penataan fasilitas pemakaman. Selanjutnya TPU tersebut diserahkan

pengelolaannya kepada masyarakat sekitar pemakaman. Pemerintah Kota Mataram akan terus berupaya untuk menambah luasan RTH untuk memenuhi rasio Tempat Pemakaman Umum. Indikator rasio TPU menunjukkan saat ini jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi.

Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram adalah upaya penanganan genangan dan resiko banjir. Sungai-sungai besar yang melalui Kota Mataram merupakan drainase utama pada sistem drainase perkotaan. Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan berpotensi untuk menimbulkan genangan. Terutama pada kawasan di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Ampenan.

Pada tahun 2017 persentase cakupan drainase dalam kondisi baik menurun sebesar 2,17 % dari 92,25 % pada tahun 2016, menjadi 90,08 % pada tahun 2017. Kondisi tersebut dicapai, selain dengan pemeliharaan saluran drainase, juga melalui pembangunan drainase baru. Panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 405.791 menurun menjadi 396.985 pada tahun 2017. Menurunnya cakupan drainase kondisi baik pada tahun 2017 antara lain diakibatkan oleh: adanya perubahan struktur organisasi pada Dinas PUPR yaitu beralihnya kewenangan pelaksanaan kegiatan penanganan drainase dari Bidang Pengairan ke Bidang Cipta Karya pada pertengahan Tahun Anggaran, yang secara tidak langsung berakibat pada kurang fokusnya penanganan drainase pada tahun 2017 karena adanya pengalihan anggaran dan tenaga pekerja. Selain itu, perlu dilakukan pendataan ulang panjang drainase sesuai kondisi terbaru untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan.

Dalam melakukan pemeliharaan drainase masih dilakukan melalui pengerahan Pasukan Biru dalam memastikan drainase berfungsi sebagaimana mestinya. Jumlah pasukan biru untuk penanganan drainase sebanyak 60 orang pada tahun 2017.

Capaian kinerja optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai selama tahun 2017 dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong sepanjang 803 m dan Pengendalian Banjir. Pada tahun 2017 kegiatan untuk perkuatan tebing sungai yaitu dengan pembangunan turap/talud/bronjong sungai yang dikerjakan sepanjang 2.528 meter dan yang dinormalisasi baru dapat dikerjakan sepanjang 411 meter.

Pelayanan publik dalam rangka menunjang perekonomian dan pelayanan publik juga terkait dengan konektivitas dan mobilitas manusia yang menunjang pemenuhan layanan publik perkotaan. Strategi tersebut dijalankan melalui:

1. Membangun konektivitas nasional dengan cara:
 - Melanjutkan peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan sarana/prasarana transportasi;
 - Melanjutkan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia transportasi;
 - Melanjutkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; dan
 - Melanjutkan penguatan konektivitas nasional yang bersinergi dengan konektivitas ASEAN.
2. Membangun industri jasa transportasi nasional dengan cara:
 - Mendorong peran pemerintah provinsi Kabupaten/BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
 - Meningkatkan kepastian hukum; dan
 - Melanjutkan reformasi regulasi/deregulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kinerja penanganan persampahan di Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI		+/-
			2016	2017	
1	Cakupan Penanganan Sampah	%	72,50	85,00	+ 12,50
2	Kebersihan	%	100	100	-
3	Tempat Pembuangan Sampah/TPS per 1000 Penduduk	m3	2,20	3,49	+ 1.29
4	Penegakan Hukum Lingkungan	%	100	87,50	- 12,50

Kinerja tersebut ditunjang oleh Kinerja Dinas Lingkungan Hidup serta Kecamatan dan Kelurahan dimana melalui penanganan sampah dengan pola pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2017 setiap Kelurahan diberikan Motor Roda 3 (tiga) untuk pengangkutan sampah. Keberadaan motor roda 3 (tiga) tersebut sebagai langkah awal penerapan sistem pengangkutan sampah mobile yang meminimalisir penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Keberadaan TPS di tengah masyarakat sekitar saat ini banyak menimbulkan protes karena aroma serta limbah cair yang dihasilkan. Namun keberadaannya masih diperlukan sampai penerapan metode mobile dapat diterapkan sepenuhnya yang membutuhkan tambahan sarana prasarana persampahan terutama truk sampah. Strategi dalam rangka mengatasi permasalahan saat ini adalah dengan mengatur waktu pembuangan sampah di tiap TPS yang dikoneksikan dengan waktu pengangkutan oleh truk sampah sehingga meminimalisir bau dan limbah cair di sekitar TPS. Strategi ini diperkuat dengan upaya pembuatan awig-awig serta upaya penegakan hukum lingkungan dengan membentuk Satuan Tugas di tiap TPS.

Kota Mataram sebagai barometer perkembangan ekonomi Provinsi NTB menjadi magnet yang menarik untuk penduduk di luar Kota Mataram untuk datang mengadu nasib di Kota Mataram. Fenomena seperti ini jelas mendatangkan permasalahan baru bagi pemerintah Kota Mataram yaitu semakin sempitnya areal perumahan dan banyaknya rumah kumuh yang ada.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), menjadi titik balik pengelolaan permasalahan perumahan di Kota Mataram dimana melalui Peraturan Walikota Mataram Nomor 51 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram terkait permasalahan perumahan masyarakat di kota mataram secara menyeluruh di tangani oleh satu instansi perangkat daerah yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Kota Mataram bertekad menuntaskan areal permukiman kumuh yang masih menjadi persoalan di perkotaan. Luasan kumuh pada tahun 2017 ini seluas 260.0 ha atau 4,24 % dari luas Kota Mataram yang tersebar di 25 Kelurahan dan 6 Kecamatan (data tahun 2016).

Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi memang tidak bisa terpisahkan dengan permasalahan perumahan dimana jumlah penduduk yang membutuhkan tempat tinggal berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan untuk area atau kawasan perumahan yang layak. Secara garis besar untuk kegiatan Pelayanan Peningkatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah dilaksanakan dengan baik

walaupun masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan anggaran. Untuk kegiatan fisik atau pelaksanaan kegiatan terlaksana rampung (100%).

Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat pada tahun 2016 cakupan layanan air bersih mencapai 70,48 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 64,67 persen. Penyediaan layanan air bersih yang dilakukan pada tahun 2017 untuk upaya peningkatan cakupan layanan air bersih dilakukan melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan pelayanan air bersih terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatan melalui ketersediaan air bersih. Penurunan persentase cakupan layanan air bersih pada tahun 2017 terjadi karena adanya peningkatan jumlah Rumah Tangga yang tidak sebanding dengan jumlah Rumah Tangga yang diintervensi oleh Dinas PUPR.

Misi 5: Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1. Sasaran Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP	58,88	60,10	63,13	105,04%
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%
3	Penilaian Unit Pelayanan Publik Kemenpan	NA	1/3	1/3	100%
4	Nominasi Inovasi Daerah	NA	1	1	100%
5	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	100%

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, Pemerintah Kota Mataram berupaya untuk terus meningkatkan layanan publik secara optimal. Hal tersebut juga menjadi tuntutan regulasi peraturan perundangan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat pelayanan publik terhadap masyarakat. Oleh karenanya Walikota Mataram menghususkan didalam

sasaran strategis pada misi kelima pada peningkatan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan publik.

Peningkatan layanan pemerintahan tersebut dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang sesuai arahan pusat digaungkan sebagai upaya reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan penilaian Kemeterian PAN dan RB Republik Indonesia berhasil ditingkatkan dari tahun awal RPJMD yaitu dari indeks level C menjadi CC pada tahun 2017.

Komponen penilaian reformasi birokrasi yang menjadi fokus utama perbaikan kinerja layanan Pemerintah Kota Mataram dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini yaitu:

Nilai AKIP Pemerintah Kota Mataram berhasil ditingkatkan levelnya dari CC pada tahun 2016 ke B pada Tahun 2017. Nilai AKIP Pemerintah Kota Mataram jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat merupakan pencapaian tertinggi yaitu 63,13 point. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil di Pemerintah Kota Mataram sudah menunjukkan kinerja yang lebih baik se-Nusa Tenggara Barat.

Perbaikan tersebut dimulai dengan penetapan indikator keberhasilan yang lebih terukur dan dapat mencerminkan keberhasilan kinerja melalui penyederhanaan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi pengawasan akan berjalan dengan lebih baik setelah penyederhanaan indikator. Dengan demikian, proses penganggaran hingga evaluasi kinerja sudah mengarah kepada pencapaian tujuan yang berarti mengedepankan pada efisiensi anggaran yang ada serta efisiensi kegiatan demi mewujudkan prioritas daerah.

Perwujudan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Aparatur pelaksana tugas dalam pemerintahan. Pencapaian kinerja bidang kepegawaian dan pengembangan SDM diarahkan untuk pencapaian Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing, Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas, dan Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. beberapa indikasi pencapaian dilihat dari Persentase pejabat structural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon, Rasio Penanganan pelanggaran disiplin PNS, Cakupan layanan administrasi kepegawaian, serta Ketersediaan system informasi kepegawaian (SIMPEG). Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram

sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan manajemen kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintah Kota Mataram. Dalam upaya mengatasi masalah disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram telah membentuk tim asistensi untuk melakukan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian termasuk pembinaan disiplin kepada seluruh SKPD sekaligus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram belum memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, karena belum mendapatkan sertifikasi akreditasi dari LAN RI sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Status terakreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat diperoleh apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sarana dan prasarana yang sesuai standar yang ditetapkan, jumlah widyaiswara yang memadai serta tenaga pengelola yang handal dan kompeten dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif, melalui kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah; Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; Rapat-rapat paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah; Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; Sosialisasi peraturan perundang-undangan; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah; Kegiatan Panitia Khusus; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD; Sosialisasi Kegiatan DPRD.

Tahun 2017, Pemerintah Kota Mataram juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang kelima kalinya. Hal ini menjadi target yang tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik dalam berkinerja memberikan pelayanan, demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat indikator yang dapat digunakan untuk membandingkan dengan pemerintah daerah lainnya yaitu LPPD. LPPD adalah hasil evaluasi mandiri pemerintah daerah terhadap berbagai dimensi kinerja pemerintahan yang telah berjalan. Terjadi peningkatan kinerja pemerintah Kota Mataram dibandingkan tahun sebelumnya dimana skor di tahun 2016 sebesar 2,9642 dengan status tinggi sedangkan kinerja pemerintah di tahun 2017 diperkirakan dapat mencapai 3,1000 lebih sehingga

meningkat statusnya menjadi sangat tinggi. Pada tahun 2016 dengan skor tersebut pemerintah Kota Mataram berada pada urutan 52 dari 92 Kabupaten/Kota terbaik dan diharapkan dengan peningkatan skor LPPD pada tahun 2017 pemerintah Kota Mataram dapat meningkat ranking penyelenggaraan pemerintahnya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan layanan publik serta mendukung Reformasi Birokrasi, sampai dengan tahun 2017 pemerintah kota mataram didukung jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD dengan ketersediaan jaringan internet untuk memudahkan akses informasi di lingkungan internal maupun eksternal sebanyak 43 SKPD. Selain SKPD, jaringan internet juga telah terpasang di taman-taman kota dan beberapa ruang publik.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna. Pemerintah Kota Mataram membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi. Dimana pada tahun 2017 telah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan Kota Mataram. Upaya lainnya dalam mendukung pengembangan jaringan dan system informasi, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan TIK.

Inovasi juga dilakukan dengan mengimplementasikan pelayanan Penanganan Gawat Darurat Pemerintah Kota Mataram yang bekerjasama dengan Kementerian Kominfo. Pelayanan tersebut menyatukan semua nomor informasi gawat darurat yang selama ini masih beragam menjadi satu nomor tunggal panggilan darurat (single emergency number) 112. Hal ini adalah langkah awal untuk rencana Program Kota Pintar (*Smart City*) terutama dalam rangka memberikan perbaikan dalam pelayanan publik.

2. Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah

Terdapat indikator keberhasilan yang ditargetkan untuk menggambarkan capaian dari sasaran strategis di Tahun 2017 dengan capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	20,66%	20,60%	27,17%	131,89

Rasio kemandirian fiskal daerah dipandang penting karena mengindikasikan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Berdasarkan table di atas terlihat bahwa dalam kurun dua tahun terakhir tingkat kemandirian fiskal daerah cenderung mengalami peningkatan dari 20,66% pada tahun 2016 menjadi 27,17% pada tahun 2017. Namun demikian, tingkat kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah masih terbilang kecil karena sebagian besar yaitu sekitar 73% pembiayaan pembangunan masih bersumber dari dana pemerintah pusat. Peningkatan kemampuan fiskal daerah dilaksanakan dengan berbagai program/kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
3. Pendataan Obyek Pajak Daerah
4. Peningkatan Manajemen Penagihan Pajak Daerah
5. Penanganan Pengaduan Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak Daerah.
6. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
7. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pajak Daerah
8. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah
9. Dokumentasi Pengelolaan Pajak Daerah
10. Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah
11. Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah
12. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah
13. Program Peningkatan Pelayanan Perpajakan

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Jumlah APBD Kota Mataram 2017	:	Rp. 1.561.075.542.994,58
Jumlah Realisasi APBD Kota Mataram 2017	:	Rp. 1.559.684.849.229,73
Persentase Realisasi APBD 2017	:	99,91%

Namun jika dipetakan berdasarkan anggaran yang mendukung pada sasaran strategis serta pemenuhan kebutuhan tetap, ditampilkan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Program dan Kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian seluruh Sasaran Strategis	731.393.576.218	683.195.876.343	93,41
Belanja Gaji dan Tunjangan	404.689.945.511	377.069.765.280	93,17
Belanja Hibah yang menysasar pada beberapa sasaran strategis	33.310.186.775	26.617.650.994	79,91
Belanja Bantuan Sosial yang menysasar penanganan Angka Kemiskinan dan Perluasan Lapangan Kerja, Serta mendukung Indeks Kota Toleran	23.010.631.322	20.008.020.000	86,95
Belanja Tidak Terduga mendukung Penanganan Bencana dan Sosial	5.555.000.000	2.460.110.358	44,29

Anggaran Program dan Kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian masing-masing Sasaran Strategis secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah SKPD	Jumlah Program	Jmlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
MISI 1: <i>Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai</i>							
TUJUAN: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal							
1	Terwujudnya situasi keamanan, kerukunan yang kondusif	3	9	21	10.449.272.225	10.172.118.000	97

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah SKPD	Jumlah Program	Jmlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
2	Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat	3	4	12	1.111.529.500	1.094.806.350	98
MISI 2 : <i>Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan IPTEK dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing</i>							
TUJUAN: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat							
3	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	3	22	98	70.526.672.088	68.186.509.030	97
4	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	2	24	71	267.296.899.482	255.175.962.195	95
5	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan masyarakat	7	32	102	14.163.457.215	13.347.737.816	94
6	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	7	16	40	6.627.824.835	5.960.471.236	90
MISI 3 : <i>Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera</i>							
TUJUAN: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal							
7	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif	7	19	47	18.196.754.471	16.654.029.664	92
8	Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	1	5	10	1.311.369.000	1.094.453.000	83
MISI 4 : <i>Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan</i>							
TUJUAN: Meningkatnya infrastruktur publik, serta penunjang ekonomi dan sosial yang berkualitas							
9	Tersedianya sarana dan prasarana publik serta	8	41	112	185.118.048.874	170.184.586.583	92

No	SASARAN STRATEGIS	Jumlah SKPD	Jumlah Program	Jmlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	penunjang perekonomian dan sosial yang memadai						
MISI 5 : <i>Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemrintahan Yang Baik (Good Governance)</i>							
TUJUAN: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel							
10	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	31	130	366	144.004.056.243	129.622.459.813	90
11	Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah	3	3	20	12.587.692.285	11.401.490.983	91

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017 menggambarkan realisasi kinerja Pemerintah Kota Mataram tahunan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil analisis capaian 28 indikator sasaran dalam menjawab 11 sasaran strategis Kota Mataram Tahun 2017, kinerja Kota Mataram berada pada kriteria sangat tinggi dengan nilai realisasi kinerja mencapai 98,33 persen. Sedangkan jika melihat pencapaian 5 (lima) Misi Kota Mataram sesuai dengan target Tahun 2017 berdasarkan 6 indikator tujuan, pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017 sebesar 99,91 persen dengan kriteria penilaian realisasi kinerja *Sangat tinggi*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja Pemerintah Kota Mataram Tahun 2017 telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Terdapat rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam rangka mengefektifkan penerapan budaya kinerja yang tertuang dalam Surat Tanggal 23 Januari 2018 Nomor: B/333/AA.05/2018 Hal: Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yaitu:

1. Melanjutkan penyempurnaan pada kualitas IKU di seluruh OPD dan menjabarkan kinerja (*cascade down*) dari level Walikota sampai ke individu pegawai;
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;
3. Menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian rewards and punishment. Selain itu Pemerintah Kota Mataram diharapkan dapat mengintegrasikan aplikasi manajemen kinerja dengan informasi keuangan untuk meningkatkan implementasi *performance based budgeting* di Pemerintah Kota Mataram

sehingga pelaksanaan manajemen kinerja dapat diimplementasikan lebih efektif dan efisien;

4. Memerintahkan kepada Inspektorat untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD dengan cara memberikan asistensi atau bimbingan kepada penanggungjawab akuntabilitas kinerja di OPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar OPD; serta kepada Bappeda dan para penanggungjawab program agar meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektifitas dan efisiensi penerapan manajemen kinerja.

Terhadap rekomendasi tersebut, beberapa poin memang telah menjadi rencana perbaikan yang sudah maupun menjadi rencana kerja yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Dimulai sejak melaksanakan konsultasi dan pendampingan ke Kementerian PAN dan RB tanggal 22 Mei 2016, sesuai arahan telah dimulai penyusunan *Cascade down* Walikota hingga ke level eselon IV pada 18 OPD. Pada Tahun 2018 akan dilanjutkan dengan ditunjang oleh Tim dari unsur Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram yang bertugas menyempurnakan indikator kinerja secara keseluruhan dari level Walikota hingga individu pegawai;
2. Cascading RPJMD disempurnakan serta digunakan sebagai alat dalam melaksanakan verifikasi Renja SKPD sebagai salah satu tahapan dalam Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2019 maupun Perubahan RKPD Tahun 2018 jika dimungkinkan guna memastikan alokasi anggaran dan sasaran OPD mengarah kepada sasaran strategis Kota Mataram.
3. Tahun 2018 telah dianggarkan penyusunan/pengadaan aplikasi penyusunan LKIP baik OPD maupun Kota Mataram yang merekam penyusunan cascading OPD dan RPJMD hingga realisasi capaian indikator kinerja serta terintegrasi dengan aplikasi perencanaan (e-MPBM) yang sudah lebih dulu ada. Sehingga diharapkan benang merah dari proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan dapat terjaga konsistensinya dimana aplikasi e-MPBM secara teknis sudah siap untuk berintegrasi dengan aplikasi SIMDa Keuangan yang digunakan dalam penganggaran dan pelaporan keuangan.
4. Komitmen Bersama antara 3 (tiga) instansi yang terlibat langsung dalam SAKIP yaitu Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam keseluruhan tahapan dari proses perencanaan hingga pelaporan. Mekanisme kerjanya adalah unsur dalam instansi tersebut akan berada dalam satu tim kerja yang terlibat dalam penyusunan cascading OPD, penyempurnaan cascading RPJMD, penyusunan PK OPD, evaluasi capaian kinerja hingga penyusunan LKIP Kota Mataram serta reuiu LKIP OPD.

5. Terhadap beberapa rekomendasi yang belum masuk dalam program kerja tahun anggaran 2018 juga akan menjadi penyempurnaan program kerja pemerintah Kota Mataram sebagai bentuk komitmen perbaikan kinerja kearah pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang tajam mengukur keberhasilan tujuan maupun sasaran strategis, kami akui semata-mata adalah kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT sehingga segala bentuk rekomendasi dan masukan menjadi bahan bagi kami untuk memotivasi dan menyempurnakan kinerja dikemudian hari.